



LAPORAN TAHUNAN 2025 DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Kota Jambi
Bahagia



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas berkat Rahmad Karunia–Nya kami dapat menyelesaikan **Laporan Tahunan OPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2025**. Laporan Tahunan ini merupakan proses Hasil Pelaksanaan dari sasaran program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya pada Dinas Sosial Kota Jambi yang bersumber dari Dana APBD Kota Jambi.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan rutin dan pembangunan selama tahun 2025 pada Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 yang bertujuan memberikan informasi atas penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Jambi.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan Laporan ini kedepan.

Jambi, Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI



YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH..... 6

1.3 TANTANGAN DAN PERMASALAHAN 6

BAB II PAGU BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL 7

2.1 PAGU BELANJA DINAS SOSIAL 7

2.2 CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL 8

 A. CASCADING 8

 B. POHON KINERJA 12

 C. CROSSCUTTING 15

2.3 CAPAIAN KINERJA 18

 A. KETERKAITAN URUSAN SOSIAL TERHADAP RPJMD 18

 B. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS DINAS SOSIAL 21

 C. TARGET DAN REALISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN..... 23

 D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2022 31

2.4 AKUNTABILITAS KINERJA 32

 A. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 32

 B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI TAHUN 2023-2025 32

 C. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 TAHUN 2022-2025 33

 D. CAPAIAN SDGs..... 34

 E. PROGRAM UNGGULAN KOTA BAHAGIA 34

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 36

BAB IV INOVASI, PRESTASI DAN PENGHARGAAN 37

BAB V PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Sosial Kota
Jambi Tahun 2025 4

1.2 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon Dinas Sosial Kota Jambi
Tahun 2025 4

1.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas Sosial Kota
Jambi Tahun 2025 5

2.1 Rincian Belanja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 7

2.2 Keterkaitan Urusan Sosial Dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 19

2.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 21

2.4 Capaian Program Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 23

2.5 Tindaklanjut Atas Rekomendasi Pansus DPRD Terhadap LKPJ Walikota
Tahun 2024 31

2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 32

2.7 Indikator Kinerja Kunci 32

2.8 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Kota Jambi
Tahun 2023-2025 33

4.1 Daftar Inovasi Dinsos Tahun 2025 37

4.2 Daftar Prestasi dan Penghargaan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Tahunan (LT) yang disusun secara rutin setiap tahun diharapkan mampu menyajikan informasi kepada seluruh pengguna laporan yang selalu menuntut akan keterbukaan dan ketepatan penyampaian informasi sesuai harapan pengguna. Pembangunan Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat, seiring dengan derasny arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sosial terus meningkat dan proporsional seiring dengan dengan kebutuhan hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negatif dari persoalan sosial cenderung meningkat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ke depan akan semakin kompleks dan multi demisional, karena masalah sosial berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif dalam bentuk Program Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kota Jambi. Dengan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan kualitas kinerja dari Dinas Sosial Kota Jambi sebagai salah satu instansi dalam jajaran Pemerintah Kota Jambi dapat dilihat pada Laporan Tahunan (LT).

Berdasarkan uraian di atas dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, maka diperlukan adanya Penyusunan Laporan Tahunan (LT) sebagai acuan evaluasi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas Sosial Kota Jambi kepada Kepala Daerah, Pemerintah Pusat maupun Masyarakat yang disusun dalam suatu bentuk Laporan.

a. Peraturan Pembentukan Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Kota Jambi sebagai organisasi perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14) mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Jambi. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari:

- a) Kepala dinas
- b) Sekretaris, yang dibantu oleh :
 - (1) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
 - (2) Sub Koordinator perencanaan dan program
 - (3) Sub Koordinator keuangan dan barang milik daerah
- c) Kepala bidang perlindungan jaminan sosial dan warga Negara migran, yang dibantu oleh:
 - (1) Sub Koordinator Bantuan Masyarakat dan Warga Negara Migran
 - (2) Koordinator perlindungan jaminan sosial penanganan fakir miskin.
 - (3) Sub Koordinator perlindungan jaminan sosial penanganan fakir miskin.
- d) Kepala bidang rehabilitasi sosial, yang dibantu oleh:
 - (1) Sub Koordinator rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terlantar.
 - (2) Sub Koordinator rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
 - (3) Sub Koordinator kerjasama anatar lembaga dan kemitraan rehabilitasi sosial.
- e) Kepala bidang pemberdayaan sosial, yang dibantu oleh:
 - (1) Sub Koordinator pemberdayaan sosial perorangan, keluarga.
 - (2) Sub Koordinator pengembangan kelembagaan masyarakat kepahlawanan dan restorasi sosial.
 - (3) Sub koordinator pengumpulan sumbangan dan KAT.
- f) Kepala bidang penanganan bencana, yang dibantu oleh:
 - (1) Sub Koordinator penanganan bencana alam dan sosial.
 - (2) Sub koordinator perlindungan bencana alam dan sosial.
 - (3) Sub Koordinator pemberdayaan kesiapsiagaan bencana.
- g) Kelompok jabatan fungsional

b. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kota Jambi

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk.I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	7
4	Penata Tk. I	III/d	10
5	Penata Muda Tk.I	III/b	3
6	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur Tk. I	II/d	1
8	Juru	I/c	1
9	PPPK	IX	34
10	PPPK	V	22
11	PPPK	I	3
Kementerian Sosial			
12	PPPK (Pendamping PKH)	IX	81
13	PPPK (Pendamping PKH)	VII	3
14	PPPK Paruh Waktu (Pendamping PKH)	IX	1
JUMLAH			169

Sumber Data: DUK Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
Dinas Sosial				
1	Pasca Sarjana (S2)	3	3	6
2	Sarjana (S1)/Diploma (IV)	23	25	48
3	Diploma (III)	-	2	2
4	Tingkat SLTA	15	10	25
5	Tingkat SD	3		3
Kementerian Sosial				
6	Pasca Sarjana (S2)	2	5	7
7	Sarjana (S1)/Diploma (IV)	32	43	75
8	Diploma (III)	0	3	3
9	Tingkat SLTA	0	0	0
JUMLAH		78	91	169

Sumber Data : DUK Dinsos Kota Jambi Tahun 2025

c. Aset Pada Dinas Sosial Kota Jambi

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Type	Kondisi (B, RR, RB)
1	Pick Up	PICK UP / KF60 MP PICK UP	RB
2	Multi Purpose Vehicle (MPV)	AVANZA 1300E (F601RM-GMDFJJ) MINIBUS MP	RR
3	Kendaraan Roda 4	ERTIGA	B
4	Kendaraan Roda 4	ERTIGA	B
5	Kendaraan Roda 4	HILUX PICK UP 2.0 MT	B
6	Kendaraan Roda 4	Cold Diesel FE 71	B
7	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Avanza 1,3 M/T NEW vin 2015	B
8	Multi Purpose Vehicle (MPV)	KIJANG INNOVA	B
9	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Calya/3 NR/G/M/T	B
10	Mobil Ambulance	Grandmax	B
11	Mobil operasional	Grandmax	B
12	Pick Up	Hilux, Pick up Single Cabin 4x2 MT	B
13	Sepeda Motor	VARIO	B
14	Sepeda Motor	VARIO	B
15	Sepeda Motor	VARIO	B
16	Sepeda Motor	VARIO	RR
17	Sepeda Motor	REVO	RB
18	Sepeda Motor	REVO	B
19	Sepeda Motor	REVO	B
20	Sepeda Motor	REVO	B
21	Sepeda Motor	44D (Xeon)	B
22	Sepeda Motor	44D (Xeon)	B
23	Sepeda Motor	44D (Xeon)	RR
24	Sepeda Motor	44D (Xeon)	RR
25	Sepeda Motor	FINO	B
26	Sepeda Motor	FINO	B
27	Sepeda Motor	FINO	B
28	Sepeda Motor	FINO	B
29	Sepeda Motor	FINO	RR
30	Sepeda Motor	FINO	B
31	Sepeda Motor	SOUL	B
32	Sepeda Motor	BYSON	B

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Type	Kondisi (B, RR, RB)
33	Sepeda Motor	VGRRDB	B
34	Sepeda Motor	All New Beat ESP CBS	B
35	Sepeda Motor	All New Beat ESP CBS	B
36	Sepeda Motor	Beat	B
37	Sepeda Motor	Beat	B

Sumber Data : Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) 2025

1.2 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Dinas Sosial Kota Jambi tidak melaksanakan Pengelolaan Pendapat Asli Daerah sehingga tidak adanya target dan Realisasi Pendapat serta Tantangan dan Permasalahnnya.

1.3 Tantangan dan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Sosial

Tantangan dan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Sosial yaitu sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian data Pemerlu Atensi Sosial (PAS) seiring dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan sasaran layanan dan bantuan sosial tidak tepat sasaran;
2. Belum adanya regulasi kebijakan terkait anak rentan dan lansia terlantar;
3. Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat produktivitas PAS;
4. Belum optimalnya kontribusi peran serta kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penanganan dan penanggulangan masalah-masalah Sosial;
5. Banyaknya PAS yang berasal dari luar daerah;
6. Ketersediaan anggaran urusan sosial yang belum maksimal.

BAB II

PAGU BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

2.1. Pagu Belanja Dinas Sosial berdasarkan Komponen Belanja beserta Realisasi

Tabel 2.1

Rincian Belanja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	Realisasi	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(Rp)	(%)
5	BELANJA DAERAH	14,668,912,000	13,798,960,500	(869,951,500)	12,120,401,061	87.84%
5.1	BELANJA OPERASIONAL	14,666,912,000	13,798,960,500	(867,951,500)	12,120,401,061	87.84%
5.1.01	Belanja Pegawai	6,560,295,317	5,740,295,317	(820,000,000)	4,789,998,242	83.45%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,480,866,683	5,432,915,183	(47,951,500)	4,722,942,329	86.93%
5.1.05	Belanja Hibah	60,000,000	60,000,000	-	59,940,000	99.90%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,565,750,000	2,565,750,000	-	2,547,520,490	99.29%
5.2	BELANJA MODAL	2,000,000	-	(2,000,000)	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,000,000	-	(2,000,000)	-	-
Jumlah		14,668,912,000	13,798,960,500	(869,951,500)	12,120,401,061	87.84%

2.2. Cascading Kinerja Dinas Sosial

a. Cascading dari RPJMD Ke Renstra sampai Sub Kegiatan untuk Tahun 2025

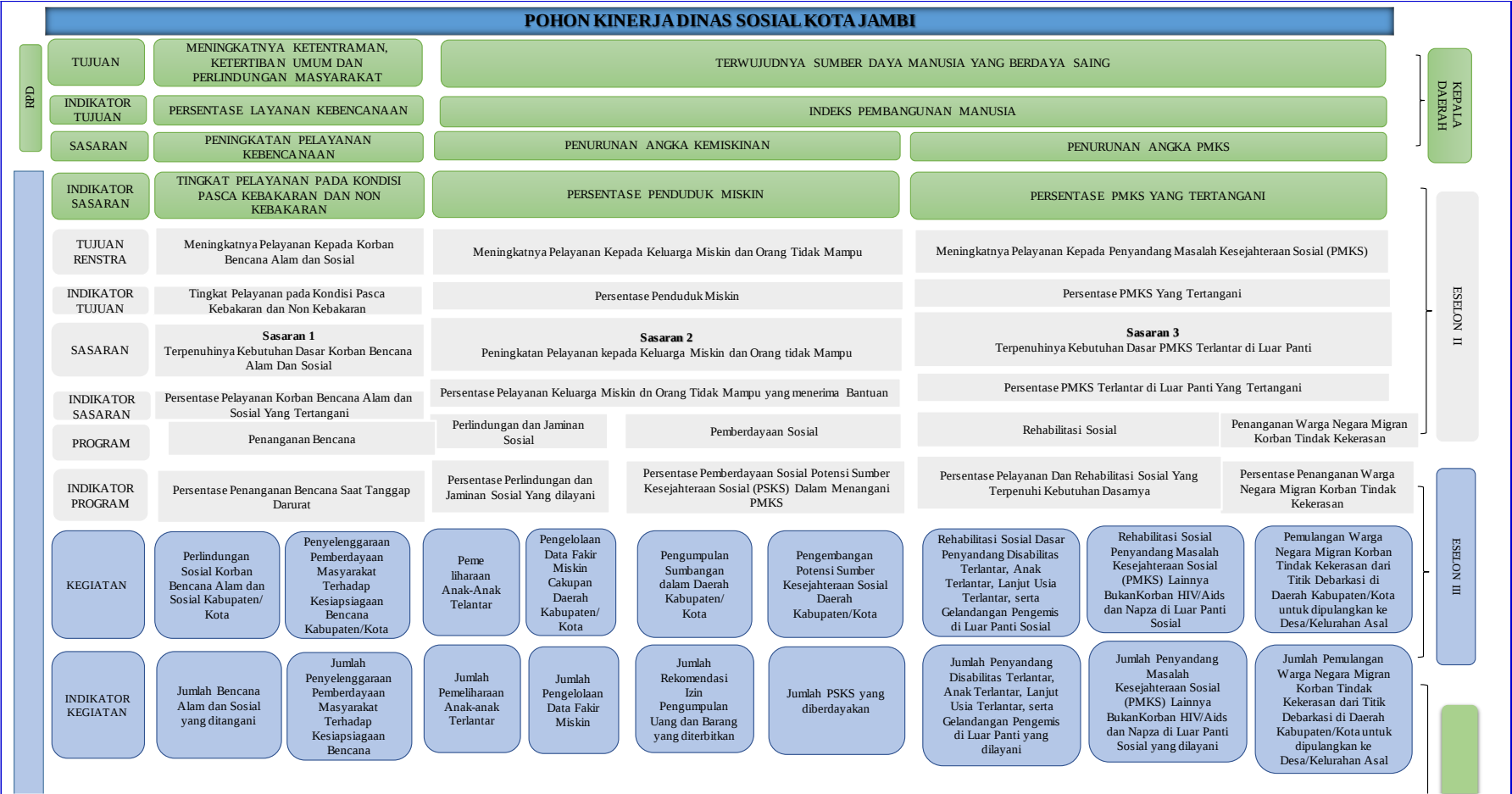
CASCADING KINERJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN 2025					
PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN		PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN		PENURUNAN ANGKA PMKS	
TINGKAT PELAYANAN PADA KONDISI PASCA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN		PERSENTASE PENDUDUK MISKIN		PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI	
Korban Bencana Alam dan Sosial		Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu		PMKS	
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial		Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan Orang tidak Mampu		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar di Luar Panti	
Persentase Pelayanan Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Tertangani		Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dn Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan		Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani	
Penanganan Bencana		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Rehabilitasi Sosial	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Persentase Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat		Persentase Perlindungan Dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (P SKS) Dalam Menangani P MKS	Persentase Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Das arnya	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Penanganan Bencana		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Rehabilitasi Sosial	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program
Penyediaan Makanan	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang	Penyediaan Permakanan	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan	
Penyediaan Sandang	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sandang		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		

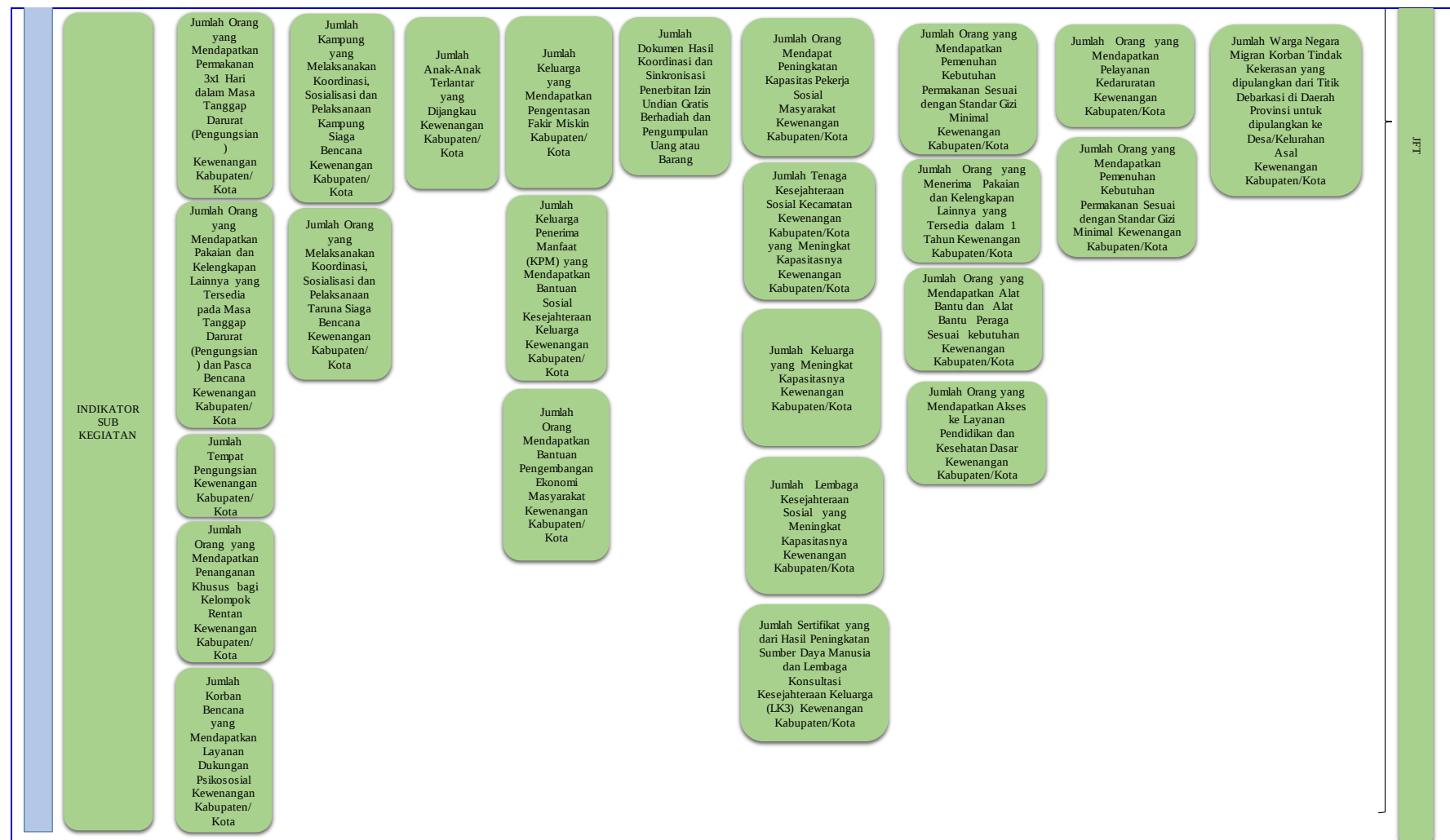
Penanganan Bencana		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Rehabilitasi Sosial	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Alat Bantu		Sub Kegiatan
Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	Pemberian Layanan Kedaruratan		

Penanganan Bencana		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Rehabilitasi Sosial	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pemberian Layanan Kedaruratan		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Bidang Penanganan Bencana		Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	Bidang Pemberdayaan Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial		Penanggung Jawab

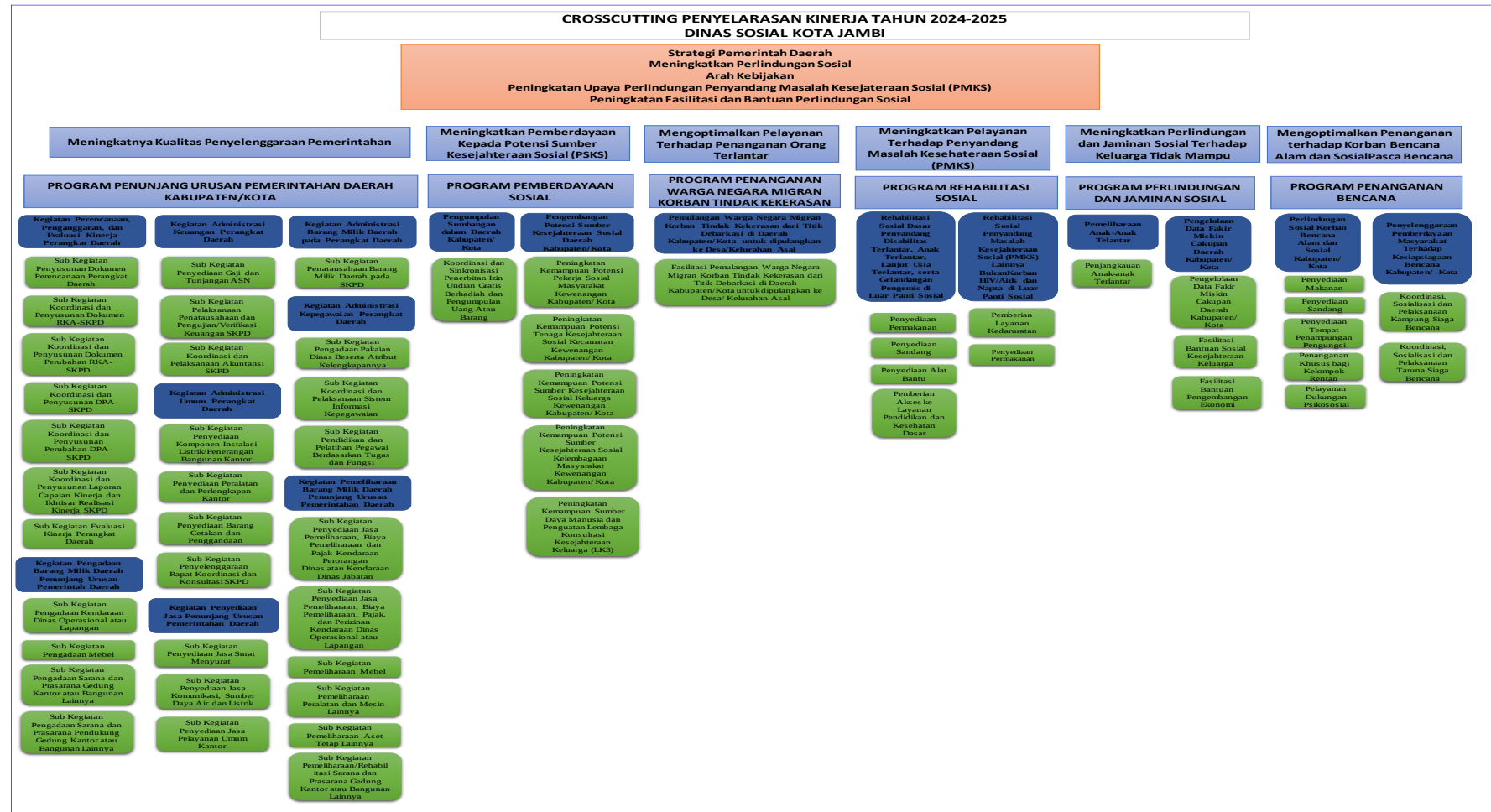
b. Pohon Kinerja

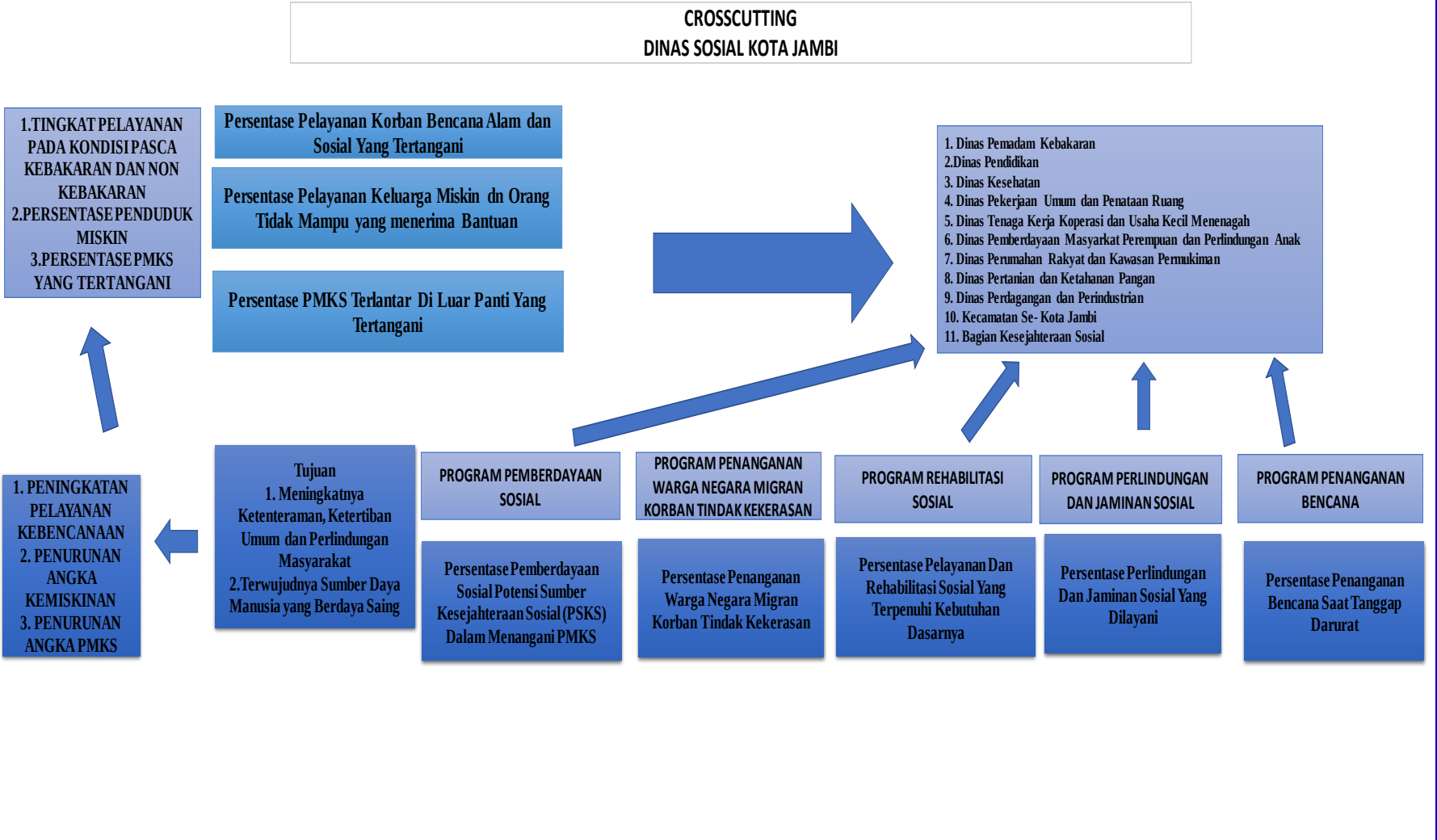


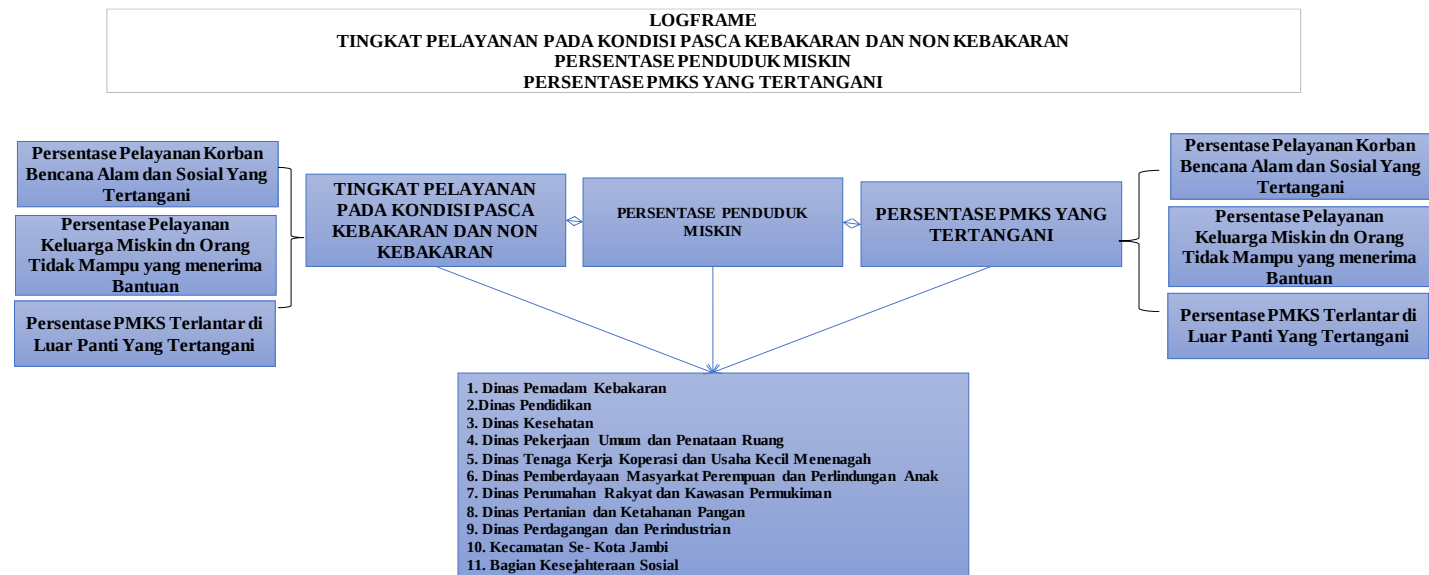




c. *Crosscutting* Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah







2.3. Capaian Kinerja Sasaran RPJMD, Tujuan dan Sasaran OPD serta Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

a. Keterkaitan Urusan Dinas Sosial terhadap RPJMD

Urusan Sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Pada RPJMD Kota Jambi 2025-2029 urusan ini mengacu pada misi 1, 2, 3 dan 4, yaitu Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan 9 (sembilan) sasaran RPJMD yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan, Peningkatan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan, Penurunan Angka Kemiskinan, Tercapainya Peningkatan Keluarga yang Berkualitas, Penurunan Gini Ratio, Meningkatkan Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis TIK, Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, . Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat, dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak. Adapun keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Keterkaitan Urusan Sosial dengan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Indikator Sasaran	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Target 2025	Realisasi 2025
Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan	Peningkatan efektivitas kebijakan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	Persentase PAS yang mendapatkan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial (SDM)	Persentase Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Tertangani	100%	172.46%
		Peningkatan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan						
		Penurunan Angka Kemiskinan		Persentase capaian program perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial terhadap data kemiskinan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar di Luar Panti	Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani	100%	105.52%
		Tercapainya Peningkatan Keluarga Yang Berkualitas		Indeks Kualitas Keluarga	Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan Orang tidak Mampu (SDM)	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan	100%	105.16%
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Penurunan Gini Ratio		Persentase PAS menerima jaminan perlindungan Sosial				
Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dan Pelayanan Publik Berbasis TIK	Meningkatkan Profesionalisme ASN, Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pelayanan Publik Berbasis TIK	Penilaian Kinerja Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik Urusan Sosial				
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah						
Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya ketertiban, ketentraman umum, perlindungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan efektivitas kebijakan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	Persentase Keterlibatan Masyarakat dan penegakan Pranata Sosial				
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak						

Indikator sasaran persentase pelayanan korban bencana alam dan sosial yang tertangani memiliki target sebesar 100% pada tahun 2025, dan mencapai realisasi sebesar 172,46%. Perhitungan persentase pelayanan korban bencana alam dan sosial yang tertangani dengan formulasi jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dibagi dengan jumlah korban bencana alam dan sosial dikali dengan 100%.

Indikator Sasaran Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan memiliki target sebesar 100% pada tahun 2025, dan mencapai realisasi sebesar 105,16%. Perhitungan persentase pelayanan keluarga miskin dan orang tidak mampu yang menerima bantuan dengan formulasi jumlah pelayanan keluarga miskin dan orang tidak mampu yang menerima bantuan dibagi dengan jumlah keluarga miskin dan orang tidak mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi dikali dengan 100%.

Indikator Sasaran Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani memiliki target sebesar 100% pada tahun 2025, dan mencapai realisasi sebesar 105,52%. Perhitungan Jumlah PPKS Terlantar Di Luar Panti yang dijangkau dengan formulasi Jumlah PPKS Terlantar Di Luar Panti yang Tertangani dibagi dengan Jumlah PPKS Terlantar di Luar Panti yang Dijangkau dikali dengan 100%.

Untuk capaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial
 Kota Jambi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Dan Sosial	Persentase Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Tertangani	100%	172.46%
2	Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan Orang tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan	100%	105.16%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar di Luar Panti	Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani	100%	105.52%

Tabel di atas menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 105,52%.

No.	PPKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	4
2	Anak Terlantar	68
3	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	4
4	Anak Jalanan (ANJAL)	10
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	19
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	1
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	32
8	Lanjut Usia Terlantar	244
9	Penyandang Disabilitas	314
10	Tuna Susila	19
11	Gelandangan dan Pengemis	203
12	Pemulung	9
13	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	8
14	Korban Penyalahgunaan NAPZA	7
15	Korban Trafficking (Korban Perdagangan Orang)	225
16	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	4
17	Orang dengan Gangguan Jiwa	148
J u m l a h		1,319

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah PPKS Terlantar Di Luar Panti yang Tertangani}}{\text{Jumlah PPKS Terlantar Di Luar Panti Yang Dijangkau}} \times 100\%$$
$$= \frac{1.319}{1.250} \times 100 \% = 105,52\%$$

2. Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial}} \times 100\%$$
$$= \frac{2.242}{1.300} \times 100 \% = 172,46\%$$

3. Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang mendapat bantuan}}{\text{Jumlah Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi}} \times 100\%$$
$$= \frac{75.718}{72.000} \times 100\% = 105,16\%$$

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilengkapi dengan Indikator, Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel 2.4

Capaian Program Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi dan Birokrasi	A	7,660,689,051	BB	6,501,490,843	84.87%	100%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	A	17,554,800	BB	15,151,100	86.31%	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14,504,800	2 Dokumen	13,126,460	90.50%	100%
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3,050,000	4 Laporan	2,024,640	66.38%	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	5,943,045,317	100%	4,998,074,892	84.10%	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	5,721,095,317	44 Orang/bulan	4,776,748,242	83.49%	100%
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	221,950,000	36 Dokumen	221,326,650	99.72%	100%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	100%	30,550,000	100%	23,976,650	78.48%	100%
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30,550,000	12 Laporan	23,976,650	78.48%	100%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	121,220,000	100%	85,312,646	70.38%	100%
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	82 Paket	54,200,000	82 Paket	54,199,946	100.00%	100%
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	67,020,000	44 Orang	31,112,700	46.42%	100%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	100%	471,596,534	100%	427,757,422	90.70%	100%
a	Penyediaan Kompoen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,776,580	1 Paket	16,334,760	97.37%	100%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,258,604	1 Paket	48,465,093	96.43%	100%
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22,201,350	1 Paket	19,423,637	87.49%	100%
d	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	217,360,000	12 Laporan	190,020,932	87.42%	100%
e	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	153,513,000	93.04%	100%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	470,282,400	100%	402,342,283	85.55%	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,050,000	12 Laporan	6,450,000	91.49%	100%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	248,200,000	12 Laporan	209,485,229	84.40%	100%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	215,032,400	12 Laporan	186,407,054	86.69%	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	606,440,000	12 Laporan	548,875,850	90.51%	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	483,030,000	30 Unit	427,742,770	88.55%	100%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	70,000,000	75 Unit	68,044,910	97.21%	100%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	53,410,000	50 Unit	53,088,170	99.40%	100%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
II	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PPKS	100%	1,516,661,850	100%	1,303,284,070	85.93%	100%
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terfasilitasi meningkat	100%	1,516,661,850	100%	1,303,284,070	85.93%	100%
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Orang	430,479,600	68 Orang	412,830,020	95.90%	100%
b	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	140,800,000	11 Orang	110,800,000	78.69%	100%
c	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarga	677,730,500	723 Keluarga	533,140,200	78.67%	100%
d	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Lembaga	259,071,750	58 Lembaga	246,513,850	95.15%	100%
e	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	8,580,000		-	100.00%	100%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Orang Terlantar	100%	39,750,000	100%	29,270,211	73.64%	100%
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terpenuhinya layanan pemulangan bagi Orang Terlantar	1 Tahun	39,750,000	1 Tahun	29,270,211	73.64%	100%
a	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	39,750,000	225 Orang	29,270,211	73.64%	100%
IV	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial	100%	1,156,249,151	100%	1,042,733,679	90.18%	105.52%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	1 Tahun	686,749,951	1 Tahun	631,787,044	92.00%	100%
a	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	275 Orang	214,700,000	838 Orang	209,789,815	97.71%	100%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
b	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	275 Orang	68,665,000	411 Orang	62,038,455	90.35%	100%
c	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	150,000,000	164 Orang	146,369,370	97.58%	100%
d	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	231,343,746	150 Orang	192,545,340	83.23%	100%
e	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	22,041,205	1.319 Orang	21,044,064	95.48%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1 Tahun	469,499,200	1 Tahun	410,946,635	87.53%	100%
a	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	275 Orang	469,499,200	275 Orang	410,946,635	87.53%	100%
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	100%	2,933,994,235	100%	2,781,117,898	94.79%	105.16%
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kesejahteraan PPKS	1 Tahun	2,933,994,235	1 Tahun	2,781,117,898	94.79%	100%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1250 Keluarga	825,855,235	57.656 Keluarga	690,471,958	83.61%	100%
b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7500 Keluarga	1,902,875,000	8.320 Keluarga	1,895,675,000	99.62%	100%
c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	275 Orang	205,264,000	292 Orang	194,970,940	94.99%	100%
VI	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	100%	491,616,213	100%	462,504,360	94.08%	100%
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Jambi	Terpenuhinya kebutuhan Dasar bagi korban Bencana Alam dan Sosial	1 Tahun	245,874,400	1 Tahun	218,781,860	88.98%	172.46%
a	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	275 orang	86,750,000	2.242 kk	73,520,770	84.75%	100%
b	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	275 orang	101,624,400	321 Orang	95,306,090	93.78%	100%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
			Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Unit	50,000,000	7 Unit	49,955,000	99.91%	100%
d	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	7,500,000	67 Orang	-	0.00%	100%
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota Jambi	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	1 Tahun	245,741,813	1 Tahun	243,722,500	99.18%	100%
a	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	245,741,813	30 Orang	243,722,500	99.18%	100%
TOTAL ANGGARAN				13,798,960,500		12,120,401,061	87.84%	100%

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2024

Tabel 2.5

Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPJ
Walikota Jambi Tahun 2024

Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
Dinas Sosial	Mengoptimalkan sistem graduasi dan membuat program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat	Telah dilaksanakan pengoptimalan sistem graduasi pada KPM-PKH dan telah diadakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat	Dinas Sosial Kota Jambi menargetkan 1 orang pendamping PKH untuk mengupayakan 10 KPM yang digraduasi. Sebanyak 72 pendamping PKH telah berhasil menggraduasi 723 keluarga. Selain itu telah dilaksanakan pelatihan inklusif bagi Penyandang Tuna Netra untuk mencetak Terapis Tuna Netra Unggul (Terang).
	Bekerja sama dengan penegak Perda untuk menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis	Telah dilaksanakan kerja sama dengan penegak Perda menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis	Dinas Sosial Kota Jambi terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Satpol PP dan Pihak Kecamatan dalam penegakan Perda dengan melakukan razia di titik rawan (lampu merah, pusat keramaian) dan melakukan pencegahan dengan memasang spanduk larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis untuk menekan aktivitas tersebut.
	Menambahkan anggaran untuk honorarium Faskel dan Tagana	Masih dilakukan pengkajian terkait penambahan anggaran tersebut.	Untuk penambahan anggaran honorarium Fasilitator Kelurahan dan Tagana akan didiskusikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait dengan harapan adanya peningkatan kinerja yang baik.

2.4. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100%
2	Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	100%
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar di Luar Panti	Persentase PPKS Terlantar di Luar Panti yang Tertangani	100%

b. Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023-2025

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Kunci

No	Urusan Sosial	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data
			2023	2024	2025	
1	Dinas Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	Bidang Rehabilitasi Sosial
2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	Bidang Penanganan Bencana

c. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2025

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023-2025

No	Uraian SPM	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	141	141 (100%)	135	135 (100%)	55	314 (100%)
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti	121	121 (100%)	87	87 (100%)	40	68 (100%)
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	260	260 (100%)	170	170 (100%)	155	244 (100%)
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	184	184 (100%)	337	337 (100%)	200	203 (100%)
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	1.559	1.559 (100%)	4.718	4.718 (100%)	1650	4.973 (100%)

d. Capaian SDGs

Tidak adanya data capaian SDGs pada Dinas Sosial Kota Jambi.

e. Program Unggulan Kota Bahagia

Dalam mendukung program unggulan Kota Jambi Bahagia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO.	PROGRAM UNGGULAN	WAKTU	INOVASI	MANFAAT	ANGGARAN	REALISASI
I	KARTU BAHAGIA					
1	Pembangunan Aplikasi Atensi dan Tata Sosial (Atasee) untuk verifikasi serta validasi data SIKS-NG	Januari s/d Desember 2025	ATASEE	Mempermudah Pendataan PPKS dan Verifikasi serta Validasi SIKS-NG	165,000,000	153,513,000
2	Pelaksanaan Pemadanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN, DTKS dan P3KE	Januari s/d Desember 2026	Verifikasi dan Validata Data Warga Miskin dengan Aplikasi Atasee	Meningkatkan akurasi data Warga Miskin yang telah dipadankan dengan Disdukcapil	563,302,500	432,420,000
3	Pemberian Bantuan Sosial Barang kepada masyarakat Miskin dan Miskin Ekstrem	Maret 2025	Bantuan Sosial Uang	Mengurangi Beban Pengeluaran bagi Warga miskin dan Keluarga Miskin Ekstrem	1,059,750,000	1,059,750,000
4	Pemberian Bantuan Sosial Uang kepada Masyarakat Miskin Esktrem	Maret 2025	Bantuan Sosial berupa Sembako	Mengurangi Beban Pengeluaran bagi Warga miskin dan Keluarga Miskin Ekstrem	27,000,000	19,800,000
II	LANSIA BAHAGIA					
1	Pemberian Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia yang tergolong miskin sendiri	Januari s/d Desember 2025	Layanan Permakanan bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Alyatama	Peningkatan kebutuhan dasar bagi lanjut usia miskin sendiri		
2	Layanan "Jenguk Lansia"	Januari s/d Desember 2025	Layanan Langsung ke Alamat bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Alyatama	Penjangkauan dan Pelayanan bagi lanjut usia langsung ke alamat		

NO.	PROGRAM UNGGULAN	WAKTU	INOVASI	MANFAAT	ANGGARAN	REALISASI
III	CALL CENTER BAHAGIA					
1	Pelayanan Pengaduan Masyarakat terkait PPKS	Januari s/d Desember 2025	Optimalisasi Layanan Jangkauan PPKS	Memperluas dan Mempermudah masyarakat dalam pengaduan pelayanan PPKS		
IV	KOTA TANGGUH					
1	Penguatan kelurahan dalam perlindungan masyarakat daerah rawan bencana	Januari s/d Desember 2025	Kesiapsiagaan Bencana	Kesiapsiagaan Bencana		
2	Dukungan untuk mewujudkan Tagana yang tangguh	Januari s/d Desember 2025	Optimalisasi Peran Tagana	Penguatan peran Tagana sebagai garda terdepan yang tanggap dan cepat dalam penanganan pasca bencana.	181,200,000	181,200,000
3	Kesiapsiagaan bencana (Penyediaan Logistik)	Januari s/d Desember 2025	Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam, Non Alam dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat saat terjadi bencana	184,250,000	183,077,320

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas Sosial Kota Jambi Pada Tahun 2025 tidak melaksanakan tugas pembantuan sehingga tidak mempunyai capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB IV
INOVASI, PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Tabel 4.1
Daftar Inovasi Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

No	INOVASI	TAHUN	NAMA OPD	KATEGORI INOVASI	RINGKASAN INOVASI
1.	ATASEE (Atensi dan Tata Sosial)	2025	Dinas Sosial	Pelayanan Publik	Atensi dan Tata Sosial (ATASEE) merupakan inovasi berupa aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk mempercepat penginputan data bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam SIKS-NG. Penggunaan aplikasi juga mempermudah proses verifikasi dan validasi data dikarenakan dokumen yang diunggah langsung dalam aplikasi. Melalui laman atasee.jambikota.go.id, masyarakat dapat mengusulkan sebagai penerima bantuan sosial.

Tabel 4.2

Daftar Prestasi dan Penghargaan Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025

No	Inovasi	Tahun	Nama OPD	Kategori Prestasi dan Penghargaan
1	ATASEE	2025	Dinas Sosial	Peringkat Sembilan Kategori Tata Kelola Pemerintah Terbaik
2	Pelayanan Publik	2025	Dinas Sosial	Kategori Sangat Baik pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) KemenPAN-RB RI Tahun 2024 dengan Indeks Nilai 4,33
3	Pelayanan Publik	2025	Dinas Sosial	Kualitas Pelayanan Baik pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2025 oleh Ombudsman RI dengan Nilai 85,62.
4	Pencegahan Terorisme	2025	Dinas Sosial	Penghargaan dari Kepolisian RI Detasemen Khusus 88 Anti Teror atas Peran dan Dukungan dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Program Deradikalisasi terhadap Eks Napiter beserta Keluarga di Provinsi Jambi
5	Bahasa Negara	2025	Dinas Sosial	Predikat Terbaik Kategori Lembaga Pemerintah pada Kegiatan Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2025 oleh Balai Bahasa Provinsi Jambi

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan (LT) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh aparat dalam Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi, dan menjadi pedoman untuk penyelenggaraan Program Kegiatan pada Tahun selanjutnya. Laporan Tahunan (LT) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2025 ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan penjabaran pada program dan kegiatan selama tahun 2025, serta dapat ditarik kesimpulan dan saran untuk perbaikan program kegiatan :

A. KESIMPULAN

1. Semua Program Kegiatan telah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
2. Persentase Realisasi Pelayanan Dasar Korban Bencana Alam dan sosial yang tertangani sebesar 172,46%;
3. Persentase Realisasi Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang menerima Bantuan sebesar 105,16%;
4. Persentase Realisasi PPKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani sebesar 105,52%.

B. SARAN

1. Perlunya menyusun kebijakan terkait Penyelenggaraan PAS;
2. Mengoptimalkan penerapan aplikasi Atasee dalam memverifikasi dan memvalidasi data PAS agar diperoleh data yang akurat;
3. Mengoptimalkan kemampuan dan kontribusi PSKS dalam hal penanganan PAS;
4. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung dalam pelayanan PAS;
5. Mengupayakan peningkatan kemandirian bagi PAS.

Demikianlah Laporan Tahunan (LT) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 dibuat. Semoga Laporan Tahunan (LT) dapat bermanfaat bagi kita semua dan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Jambi, Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL,



YUNITA INDRAWATI, AP, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002